

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sektor publik permasalahan pengelolaan keuangan daerah menjadi sorotan dan paling banyak dibicarakan, maka hal tersebut dapat diatasi dengan mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah untuk mengetahui baik atau tidaknya kinerja keuangan pemerintah daerah guna dilakukan perbaikan, pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Pemerintah daerah sebagai pihak dalam menjalankan roda pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan pembangunan melalui pelayanan publik guna kesejahteraan masyarakat dan dituntut untuk dapat melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut yang menyebabkan terwujudnya proses pergantian dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi yang disebut dengan otonomi daerah.

Dengan berjalannya otonomi daerah dari UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang tersebut disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah mengindikasikan bahwa daerah diberikan kewenangan atau otonomi daerah untuk mengelola sumber keuangan daerah yang bersangkutan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang memperhatikan potensi, keadaan, kebutuhan daerah masing-masing sehingga terciptanya pembagian keuangan yang proporsional, efektif dan efisien. Kedua Undang-undang tersebut kemudian diperbarui dan disempurnakan menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan tanggung jawab suatu daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di suatu daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya otonomi, suatu daerah diharapkan mandiri dalam

pengelolaan keuangan dengan dilakukannya peningkatan Pendapatan Asli daerah sehingga daerah tidak bergantung pada Dana Perimbangan (dana transfer) yang berasal dari pemerintah pusat.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah yang merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. APBD menjadi patokan dalam mengevaluasi kinerja yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat agar dapat mandiri secara ekonomis. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 yang mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, taat pada peraturan perundang-undangan dan bermanfaat bagi masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor penting dalam mencapai keberhasilan dalam meningkatkan pembangunan serta menyelenggarakan urusan pemerintah.

Kinerja keuangan daerah adalah hasil pencapaian suatu kegiatan atau kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dan menyakini bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan kewajibannya dalam membiayai belanja daerah sesuai dengan kebutuhan daerah guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak bergantung sepenuhnya pada dana yang berasal dari pemerintah pusat dan mempunyai inisiatif dan kreatif dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan serta agar dana yang dikelola dan penyelenggaraan urusan pemerintah dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan tidak terjadinya pemborosan (Alfarisi & Salman, 2015).

Pengukuran kinerja keuangan bersumber dari informasi finansial yang diukur berdasarkan anggaran yang dibuat dan dapat menjadi peningkatan program selanjutnya demi menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas (Sari, 2016). Pentingnya pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan karena masih adanya masalah yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah seperti masih tingginya proporsi anggaran untuk belanja tidak langsung dibandingkan belanja langsung sehingga mengakibatkan rendahnya kinerja keuangan pemerintah daerah dan mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak menjalankan kinerjanya dengan baik. Baik tidaknya kinerja keuangan pemerintah dapat dipengaruhi oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dan ketergantungan pada dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat. Jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka akan berpengaruh pada kualitas kinerja keuangan pemerintah yang menyebabkan pengelolaan keuangan daerah terlaksana dengan baik.

Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari sistem pengendalian. Dalam tahap penilaian kinerja keuangan pemerintah, akuntansi manajemen berperan dalam mengukur indikator kinerja untuk masing-masing aktivitas yang dilakukan dan menggambarkan kinerja keuangan pemerintah terkait pengelolaan keuangan daerah yang transparansi dan akuntabilitas (Mardiasmo, 2018). Berdasarkan hasil pemeriksaan audit dalam ikhtisar hasil pemeriksaan melalui pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) mengungkapkan seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jambi mempunyai opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Seluruh Provinsi Jambi menunjukkan tingkat transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di tahun 2015-2018 sebagai indikator penilaian yang akan dilakukan karena Provinsi Jambi menyediakan Laporan Realisasi Anggaran dengan lengkap dari tahun 2015-2018. Dalam hal akuntabilitas seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jambi terkait opini LKPD yang diberikan oleh BPK diperoleh melalui website resmi Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi yang menunjukkan tingkat akuntabilitas dimana di tahun 2015-2018 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kinerja keuangan pemerintah daerah mampu meningkatkan pendapatan daerah setiap tahunnya dilihat dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi daerahnya. Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting dilakukan karena pemerintah pusat menerapkan kebijakan otonomi daerah dengan harapan pemerintah daerah mampu secara mandiri melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya yang bertujuan agar proses pembangunan daerah dapat dilakukan dengan maksimal tanpa ada bantuan dana transfer dalam bentuk dana perimbangan dari pemerintah pusat (Antari & Sedana, 2018). Kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan operasional berbeda-beda, kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah tercermin dalam APBD baik belanja langsung maupun tidak langsung menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik khususnya dalam pengelolaan belanja daerah maka pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik secara demokratis, adil dan merata serta berkelanjutan.

Salah satu instrumen untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dilakukan dengan menggunakan analisis rasio terhadap APBD. Menurut (Halim & Kusufi, 2014), pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel salah satunya adalah dengan melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan konsep *Value For Money* berdasarkan pengukuran ekonomis, efisien, dan efektif. *Value For Money* merupakan pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik, dan untuk mencapai suatu pemerintah daerah yang baik dan bertanggungjawab dengan dilakukannya pengelolaan dana publik maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik. Oleh karena itu dilakukan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan konsep *Value For Money* dengan membandingkan laporan realisasi anggaran

tahun 2015-2018 sebagai evaluasi agar pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang transparan di masa yang akan datang. Rasio ini mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang diukur dengan sumber Pendapatan Asli Daerah terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat, sehingga dapat diketahui kemampuan daerah dalam mencapai target pendapatan daerahnya. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan adalah PAD dan Dana Perimbangan. Pemerintah pusat memberikan wewenang dan tanggungjawab kepada pemerintah daerah terkait Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang merupakan salah satu komponen dalam pendapatan daerah dan merupakan sumber pembiayaan untuk belanja daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan ekonomi suatu daerah dalam mengelola keuangannya untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menggali PAD yang akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat dan menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan untuk memperlancar urusan pemerintahan dan program-program pembangunan daerah guna terlaksananya otonomi daerah yang akan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat itu sendiri (Bastian, 2012).

Dana Perimbangan juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi tersebut. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan membantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah serta mengurangi

kesenjangan pembagian dana untuk pembangunan daerah yang merata. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Semakin besar kontribusi dana perimbangan menunjukkan semakin besar pula ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat, dan berkurangnya jumlah dana untuk membiayai pembangunan daerah, oleh karena itu diharapkan dapat meningkatnya sumber-sumber keuangan suatu daerah (Bastian, 2012).

Berikut ini data terkait Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Provinsi Jambi (Dalam Jutaan Rupiah)

| Kabupaten/Kota Provinsi Jambi | Periode | Pendapatan Asli Daerah | Dana Perimbangan |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| Kabupaten Kerinci | 2015 | 70.462 | 657.795 |
| | 2016 | 79.681 | 788.040 |
| | 2017 | 74.239 | 812.810 |
| | 2018 | 80.481 | 802.841 |
| Kabupaten Merangin | 2015 | 76.949 | 789.781 |
| | 2016 | 75.158 | 1.038.316 |
| | 2017 | 86.692 | 979.514 |
| | 2018 | 89.305 | 978.237 |
| Kabupaten Sarolangun | 2015 | 85.377 | 828.422 |
| | 2016 | 92.285 | 880.566 |
| | 2017 | 85.513 | 768.388 |
| | 2018 | 123.568 | 771.255 |
| Kabupaten Batang Hari | 2015 | 42.628 | 686.321 |
| | 2016 | 73.354 | 892.440 |
| | 2017 | 87.929 | 928.625 |
| | 2018 | 98.809 | 888.246 |
| Kabupaten Muaro Jambi | 2015 | 51.995 | 774.206 |
| | 2016 | 60.600 | 993.616 |
| | 2017 | 77.927 | 958.352 |
| | 2018 | 90.305 | 978.668 |
| Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 2015 | 38.474 | 733.467 |

| | | | |
|--------------------------------|------|---------|-----------|
| | 2016 | 43.936 | 968.374 |
| | 2017 | 76.776 | 896.259 |
| | 2018 | 49.607 | 905.488 |
| Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 2015 | 68.040 | 716.830 |
| | 2016 | 85.907 | 1.049.466 |
| | 2017 | 98.779 | 1.037.376 |
| | 2018 | 138.984 | 1.096.230 |
| Kabupaten Tebo | 2015 | 62.322 | 654.488 |
| | 2016 | 60.938 | 828.098 |
| | 2017 | 68.406 | 780.757 |
| | 2018 | 76.160 | 806.444 |
| Kabupaten Bungo | 2015 | 105.277 | 734.988 |
| | 2016 | 114.818 | 866.039 |
| | 2017 | 183.134 | 909.063 |
| | 2018 | 133.848 | 917.465 |
| Kota Jambi | 2015 | 263.926 | 858.678 |
| | 2016 | 287.565 | 1.177.857 |
| | 2017 | 397.328 | 1.013.006 |
| | 2018 | 338.892 | 1.110.715 |
| Kota Sungai Penuh | 2015 | 36.247 | 452.261 |
| | 2016 | 36.632 | 590.421 |
| | 2017 | 31.421 | 561.310 |
| | 2018 | 34.184 | 571.604 |

Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi)/Data Diolah, 2021

Dari tabel 1.1 diatas, Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh pada tahun 2015-2016 Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh di Kabupaten Kerinci, Sarolangun, Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Bungo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan dan di daerah yang lain mengalami penurunan. Pada tahun 2016-2017 Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh di Kabupaten Merangin, Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Tebo dan Bungo mengalami peningkatan dan di daerah yang lain mengalami penurunan. Pada tahun 2017-2018 Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh di Kabupaten Kerinci, Merangin, Sarolangun, Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tebo dan Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan dan di daerah lain mengalami penurunan. Kabupaten yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu Kabupaten

Batang Hari, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Barat serta Kabupaten/Kota yang lainnya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Total Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi pada tahun 2015 sebesar Rp. 901.697 , di tahun 2016 sebesar Rp. 1.010.874 , di tahun 2017 sebesar Rp. 1.268.144, dan di tahun 2018 sebesar Rp. 1.254.143.

Porsi dana transfer dalam bentuk dana perimbangan masih mendominasi pendapatan asli daerahnya artinya ketergantungan daerah terhadap dana dari pemerintah pusat masih tinggi. Penyebab tingginya ketergantungan dana yang berasal dari pemerintah pusat yaitu besarnya dana yang berasal dari pemerintah pusat yang dialokasikan untuk belanja rutin maupun belanja modal untuk membiayai kebutuhan suatu daerah. Rendah dan kurangnya kemampuan suatu daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah. Tingginya dana untuk belanja rutin dibandingkan modal yang mengakibatkan rendahnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu ukuran untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Data-data yang terkumpul terkait Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang diukur menggunakan analisis rasio dengan menggunakan konsep *Value For Money* di uji untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dimana data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. Fenomena tersebut dapat dilihat dari data diatas, yang menunjukkan masih besarnya kontribusi dana perimbangan dibandingkan PAD terhadap APBD yang dapat menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah. Dan diketahui pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri serta memberikan perbandingan antara jumlah PAD dan Dana Perimbangan seluruh Provinsi Jambi.

Beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, mengemukakan perbedaan hasil. (Darwins dan Saputra, 2014) mengemukakan bahwa pendapatan daerah memiliki peranan

penting, karena melalui pendapatan daerah tersebut dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga pemerintah daerah akan terus-menerus meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Julitawati, 2012) dan (Wenny, 2012) yang mendapatkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian (Antari & Sedana, 2018) dan (Suprianto, 2013) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Semakin tingginya PAD mampu meminimalkan ketergantungan daerah terhadap terhadap bantuan dana yang bersumber dari pemerintah pusat. Baik tidaknya kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil penelitian (Andirfa, 2016) menyatakan bahwa secara parsial dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya semakin besar jumlah penerimaan dana transfer (dana Perimbangan) maka semakin kuat pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat. Hasil penelitian ini sejalan dengan Menurut (Indriani & Sastradipraja, 2014) yang mengemukakan bahwa tingginya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat berarti pemerintah daerah belum secara optimal menggali potensi-potensi yang dimiliki daerahnya untuk mendapatkan pendapatan yang lebih. Penelitian yang dilakukan (Armaja & Aliamin, 2015), (Wahyuningsih & Endah, 2016), serta (Budianto dan Alexander, 2016) juga mendapatkan hasil yang sama yaitu dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena dan adanya *gap research* dari penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan karena masih adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan guna melihat seberapa besar pengaruh yang dihasilkan oleh masing-masing variabel tersebut yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah. Peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting dilakukan karena merupakan cerminan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakatnya. Penelitian ini juga dilakukan untuk membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode ke periode selanjutnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Maka peneliti ingin mengetahui variabel-variabel terkait judul tersebut yaitu **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Periode 2015-2018.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka secara terperinci masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Periode 2015-2018?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Periode 2015-2018?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Periode 2015-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Periode 2015-2018?
2. Untuk mengetahui Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Periode 2015-2018?
3. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Periode 2015-2018?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah Daerah

Dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dan juga gambaran bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan serta menemukan arah dan strategi di dalam perbaikan kinerja keuangan pemerintah daerah. Serta agar birokrasi di pemerintah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dan dapat memberikan masukan dan informasi untuk mengambil kebijakan dalam peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Peneliti/Penulis

Dalam penelitian ini dapat menjadi suatu tambahan wawasan, pengalaman, ilmu pengetahuan atas informasi-informasi yang dibutuhkan untuk menyusun rancangan penelitian. dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jambi.

3. Masyarakat

Dalam penelitian ini dapat menjadi acuan agar masyarakat sebagai dasar penilaian agar dapat memahami pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan pemerintah Daerah Provinsi Jambi terkait Sektor Publik. Dan untuk memberikan informasi keuangan daerah kepada masyarakat melalui website resmi atau Laporan Realisasi Anggaran sebagai pertanggungjawaban yang telah disusun oleh pemerintah daerah.

4. Bagi Profesi di bidang Akademik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam sektor publik serta mendalami terkait penelitian yang sejenis dan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.